

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

# Revitalisasi Kawasan Monas Dianggap Dipaksakan

## PSI melaporkan pemerintah DKI ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

### Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

**JAKARTA** — Sejumlah kalangan menilai revitalisasi kawasan Monumen Nasional janggal. Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan, menyebutkan proyek pemugaran taman seluas 80 hektare itu seperti diforsir agar segera rampung. "Terlihat sangat dipaksakan," ujarnya kepada *Tempo*, kemarin.

Revitalisasi Monas menuai kritik publik. Komisi Bidang Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta merekomendasikan agar Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan menghentikan proyek itu karena DKI belum mengantongi izin renovasi dari Sekretariat Negara, selaku pemilik lahan. Sementara itu, sejumlah kalangan ragu akan kemampuan PT Bahana Prima Nusantara selaku kontraktor karena lokasi kantor mereka yang sulit dilacak tidak merepresentasikan perusahaan yang mampu menggarap proyek senilai Rp 64 miliar tersebut.

Misbah menilai penggunaan alamat virtual Bahana Prima rentan menimbulkan masalah di kemudian hari. Pemerintah DKI, dia melanjutkan, bisa kesulitan meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan proyek. Dia juga ragu akan rekam jejak perusahaan tersebut. "Apakah perusahaan sudah memiliki pengalaman yang cukup dalam mengerjakan proyek serupa dan bernilai tertentu," ujarnya.

Misbah meminta Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit revitalisasi Monas. Sebab, dia melanjutkan, ada kejanggalan mulai dari proses lelang hingga pelaksanaan proyeknya.

Anggota Komisi Bidang Pembangunan DPRD Jakarta, Justin Adrian, mengungkapkan hal serupa. Legislator ini menilai Dinas Cipta Karya seperti memaksakan revitalisasi kawasan Monas untuk segera berjalan.

Justin mengungkapkan, biasanya organisasi perangkat daerah akan menunda pelaksanaan proyek dengan skema tahun tunggal jika hingga September lelang pekerjaan itu belum dilakukan oleh Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa DKI Jakarta. Sebab, dari sisi waktu, kecil kemungkinan proyek itu bisa rampung hingga akhir tahun.

Berdasarkan situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik DKI, lelang proyek revitalisasi Monas diumumkan pada 9 Oktober lalu dengan harga perkiraan sendiri Rp 71,3 miliar. Bahana Prima memenangi tender dengan nilai kontrak Rp 64,4 miliar. Adapun kontrak kerja baru disepakati Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta dengan Bahana Prima Nusantara pada 12 November 2019. Rentang waktu kerjanya disepakati untuk 50 hari kalender.

Justin juga mempertanyakan alasan Dinas Cipta Karya memberi waktu perpanjangan pengerjaan revitalisasi Monas sepanjang 50 hari bagi Bahana Prima. "Dasarnya apa?" ujar

politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.

Anggota tim advokasi PSI, Patriot Muslim, melaporkan pemerintah DKI ke Komisi Pemberantasan Korupsi, kemarin. Mereka menuding ada tindak pidana korupsi dalam revitalisasi Monas.

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Heru Hermawanto mengatakan lelang revitalisasi kawasan Monas baru dilaksanakan pada Oktober karena pemenang sayembara desain renovasi Monas baru menyerahkan detail *design engineering* ke dinas sebulan sebelumnya. Setelah desain diserahkan, mereka baru meminta Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa melelang proyek itu.

Heru menyatakan bahwa Bahana Prima mampu mengerjakan proyek tersebut. Hingga Rabu lalu, dia melanjutkan, pekerjaan mereka telah mencapai 84 persen. "Saya akui kalau pekerjaan memang bagus," ujarnya.

Menurut dia, Bahana Prima bakal dikenai denda karena telat dalam mengerjakan revitalisasi Monas. Namun Dinas memberi perpanjangan waktu 50 hari untuk perusahaan itu guna menyelesaikan proyek tersebut.

Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa DKI Jakarta, Blessmiyanda, mengatakan, sebelum lelang dimulai, lembaganya melakukan kajian dan revitalisasi itu bisa dikerjakan sesuai dengan tenggat. "Bahana Prima telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan harga," katanya.

● IMAM HAMDI | HALIDA BUNGA